

ANALISIS ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH DAN TINGKAT PENDIDIKAN TERTINGGI PADA PERTUMBUHAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DKI JAKARTA

Anita Ria¹⁾, Heri Nurranto²⁾

^{1,2}Program Studi Pendidikan Ekonomi, FIPPS
Universitas Indraprasta PGRI Jakarta
Email : anitarianita@gmail.com

ABSTRACT

This analysis is based on the perspective that, School Participation Rate and Highest Level of Education has an impact to Gross Domestic Income. DKI Jakarta to be sampled to analyze and prove the relevance of these variables. This research data is time series, where each variable research using data from 1990 through 2014. The data obtained from the Central Statistics Agency of Jakarta. The results of multiple linear regression equation, $Y = 67,367,213.85 - 323,649APS + 230,162TPT$. These results indicate that the figure is the School's participation in partial effect on Gross Domestic Income, with a coefficient that is 323.649, with t-test calculated at -2.212. Highest Education Level Variables proven effect on the GDP with a coefficient of 230.162, as evidenced by t-value is 9,990. Simultan Effect of variables School Participation Rate and Education Level Highest to Gross Domestic Income in the calculation result R-square of 0.908, F-value 114.62.

Keywords: School Enrollment, Highest Level of Education, Gross Domestic Income

ABSTRAK

Analisis ini didasarkan pada perspektif bahwa, Angka Partisipasi Sekolah dan Tingkat Pendidikan Tertinggi mempunyai dampak terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto. DKI Jakarta dijadikan sampel untuk menganalisis dan membuktikan adanya keterkaitan variabel tersebut. Data penelitian ini merupakan data *time series*, dimana setiap variabel penelitian menggunakan data dari tahun 1990 sampai dengan 2014. Data-data diperoleh dari Badan Pusat Statistik DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui pengujian model regresi diperoleh persamaan regresi linear berganda $Y = 67367213,85 - 323,649APS + 230,162TPT$. Hasil ini menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Sekolah secara parsial berpengaruh terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto, dengan besar koefisien yaitu 323,649, signifikan pada uji t-hitung -2,212. Variabel Tingkat Pendidikan Tertinggi terbukti berpengaruh terhadap PDRB dengan koefisien 230,162, terbukti pada uji t hitung 9.990. Pengaruh simultan variabel Angka Partisipasi Sekolah dan Tingkat Pendidikan Tertinggi terhadap PDRB ditunjukkan oleh R *square* sebesar 0,908, pada uji F-hitung 114,62.

Kata kunci: Angka Partisipasi Sekolah, Tingkat Pendidikan Tertinggi, PDRB

PENDAHULUAN

Jakarta merupakan satu-satunya kota di Indonesia yang memiliki status setingkat provinsi. Jakarta memiliki luas sekitar 662,33 km² (lautan: 6.977,5 km²), dengan penduduk berjumlah 9.607.787 jiwa (2010). Wilayah metropolitan Jakarta (Jabotabek) yang berpenduduk sekitar hampir 12 juta jiwa (2012), merupakan metropolitan terbesar di Indonesia atau urutan keenam dunia. (Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2010).

Sebagai ibukota negara Indonesia, DKI Jakarta menjelma sebagai provinsi yang mempunyai masalah kompleks terutama masalah sosial dan kependudukan. Hal ini menuntut adanya kebijakan dan solusi yang tepat untuk mencegah juga meminimalisir dampak dari perubahan pengaruh era globalisasi dewasa ini. Pada sisi lain, Jakarta juga sebagai pusat ekonomi nasional terbesar karena hampir 70 persen dari seluruh uang masyarakat Indonesia beredar di Jakarta, sehingga menjadi pemicu utama timbulnya arus urbanisasi yang kian deras di wilayah DKI Jakarta. (Badan Pusat Statistik DKI Jakarta, 2010). Pertumbuhan pendudukan DKI Jakarta pada tahun 2000 dan 2010 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 1
Jumlah Penduduk Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2000 dan 2010

Uraian	Tahun 2000	Tahun 2010
Jml Penduduk (Jiwa)	8.347.083	9.607.787
Laki-laki (Jiwa)	4.223.125	4.870.938
Perempuan (Jiwa)	4.123.958	4.736.849
Pertumbuhan Penduduk(%)	0,14	1,42
Kepadatan Penduduk (Jiwa/ Km)	12.603	13.158
Sex Ratio (Persen)	102	103

Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta diolah, 2016.

Data di atas menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan penduduk dalam kurun waktu 10 tahun, mencapai kenaikan kepadatan penduduk sekitar 10 persen setiap tahunnya, dimana proporsi penduduk laki-laki sebesar lebih besar dibandingkan penduduk perempuan. Keadaan ini tentunya menimbulkan dampak tersendiri, baik

dampak positif maupun negatif pada pertumbuhan ekonomi di Provinsi DKI Jakarta.

Dampak positif, misalnya pada faktor ekonomi tersebut adalah dapat dilihat dari perbandingan pendapatan regional DKI Jakarta yang lebih tinggi daripada provinsi-provinsi lain di Indonesia. Produk Domestik Regional Bruto harga konstan provinsi-provinsi di Indonesia tersebut dapat digunakan sebagai indikator untuk menggambarkan perubahan tingkat kemakmuran di setiap provinsi dan sebagai dasar perencanaan atau proyeksi pembangunan pada masa mendatang.

Tabel 2
Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi di Indonesia tahun 2005 – 2009

Provinsi	PDRB Per Kapita (dalam ribuan rupiah)				
	2005	2006	2007	2008*	2009**
Kep. Riau**)	23.756	24.304	24.922	25.478	25.291
Bengkulu *)	3.984	4.154	4.353	4.497	4.609
<i>DKI Jakarta**</i>	<i>33.205</i>	<i>34.837</i>	<i>36.733</i>	<i>38.671</i>	<i>40.269</i>
Jawa Tengah*)	4.488	4.690	4.914	5.143	5.346
Sulawesi Utara**)	5.945	6.222	6.559	6.988	7.465
Gorontalo *)	2.166	2.294	2.436	2.593	2.755
Kalimantan Timur**)	32.537	32.689	32.527	33.316	33.333
Kalimantan Selatan*)	7.066	7.307	7.632	7.990	8.272
Papua*)	11.479	9.318	9.526	9.264**	10.931**

Keterangan: * Angka sementara, ** Angka sangat sementara, **) Provinsi dengan PDRB tertinggi pada pulau masing-masing, *) Provinsi dengan PDRB terendah pada pulau masing-masing

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, diolah.2016

Dari data PDRB per Kapita atas Dasar Harga Konstan tahun 2005 – 2009, Provinsi DKI Jakarta memiliki PDRB per Kapita tertinggi dibandingkan 32 provinsi lainnya di Indonesia selama lima tahun berturut-turut sejak tahun 2005 – 2009 dengan kata lain bahwa DKI Jakarta

sebagai Ibukota negara Indonesia memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang paling baik diantara provinsi di Indonesia.

Dampak negatif dari laju pertumbuhan penduduk yang sangat besar adalah dimungkinkan berdampak pada kesenjangan dan ketimpangan masalah sosial kependudukan. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM (*Human Development Index* atau HDI) di Provinsi DKI Jakarta, yang merupakan cara pengukuran keberhasilan pembangunan dilihat dari indikator non ekonomi. IPM atau HDI ini diukur berdasarkan tiga indikator yaitu tingkat harapan hidup, tingkat melek huruf dan pendapatan riil per kapita berdasarkan paritas daya beli. (Lincoln Arsyad, 2010: 46).

Sebagai pusat ekonomi terbesar di Indonesia, DKI Jakarta harus didukung oleh kualitas sumber daya manusia sebagai *human capital* (modal insani) untuk menjalankan pertumbuhan perekonomian. Pendidikan yang memadai akan berdampak pada tingginya kualitas sumber daya manusia pada setiap provinsi. Tingkat pendidikan yang dimiliki masyarakat tersebut dapat dilihat dari rasio pertumbuhan variabel pendidikan yaitu antara lain adalah Angka Partisipasi Sekolah dan Tingkat Pendidikan Tertinggi.

Angka Partisipasi Sekolah dan Tingkat Pendidikan Tertinggi yang didata pada Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta adalah hal yang dapat diamati dan diteliti dimana dalam teori *Human Capital* bahwa pendidikan merupakan modal untuk pertumbuhan perekonomian suatu negara.

Suatu sektor industri usaha yang memiliki kualitas sumber daya manusia dengan tingkat pendidikan yang memadai akan dapat mempengaruhi kinerja dan kualitas tenaga kerjanya serta produktivitas angkatan kerjanya. Demikian juga di provinsi DKI Jakarta yang akan berdampak pada peningkatan *output* barang dan jasa yang dihasilkan dari sektor-sektor industri yang dapat dihitung melalui pertumbuhan dan jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihasilkan pada wilayah tersebut.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar hubungan dan pengaruh Angka Partisipasi Sekolah dan Tingkat Pendidikan Tertinggi masyarakat DKI Jakarta terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) melalui data-data sekunder Angka Partisipasi Sekolah, Pendidikan Tertinggi dan Produk Domestik Bruto dari tahun 1991 – 2014.

Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah adalah persentase/ proporsi penduduk yang masih sekolah pada jenjang pendidikan tertentu (misalnya SD) terhadap penduduk usia sekolah yang bersangkutan (misalnya untuk SD, penduduk kelompok dengan usia sekolah adalah 7-12 tahun). Jika Angka Partisipasi Sekolah (APS) mencapai angka 100 persen, artinya semua anak usia 7-12 tahun sudah berpartisipasi dalam pendidikan formal (bersekolah). Pendekatan yang digunakan dalam menghitung angka partisipasi sekolah digunakan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM).

Angka Partisipasi Kasar adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Misal, APK SD sama dengan jumlah siswa yang duduk di bangku SD dibagi dengan jumlah penduduk kelompok usia 7 sampai 12 tahun.

Menurut BPS Kabupaten: Kegunaan APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Cara menghitung APK didapat dengan membagi jumlah penduduk yang sedang bersekolah (atau jumlah siswa), tanpa memperhitungkan umur, pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tersebut. Data yang diperlukan untuk menentukan penghitungan APK:

1. Data jumlah penduduk yang pada tahun t sedang sekolah (atau menjadi siswa) dari berbagai usia, pada setiap jenjang pendidikan.
2. Data jumlah penduduk per kelompok usia standar (lihat tabel usia standar) yang berkaitan dengan setiap jenjang pendidikan.

Sumber data APK dapat dihitung dengan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) dari Keterangan Pendidikan. Untuk itu, digunakan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Untuk pembilang, digunakan pertanyaan tentang partisipasi sekolah, yaitu penduduk yang saat disurvei masih bersekolah. Kemudian penduduk yang masih sekolah dikelompokkan menurut pertanyaan tentang Jenjang dan Jenis Pendidikan Tertinggi.

2. Untuk penyebut, digunakan pertanyaan usia responden dari seksi "Keterangan Anggota Rumah Tangga" untuk mengelompokkan penduduk sedang sekolah berdasarkan kelompok usia yang berkaitan dengan tingkat pendidikan.

Definisi Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut BPS Kabupaten: Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama.

Kegunaan Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Seperti APK, APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Tetapi, jika dibandingkan APK, APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.

Cara Menghitung APM di suatu jenjang pendidikan didapat dengan membagi jumlah siswa atau penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut. Data yang diperlukan dalam menentukan Angka Partisipasi Murni:

1. Jumlah penduduk kelompok usia sekolah yang masih bersekolah di tingkat pendidikan tertentu.
2. Jumlah penduduk kelompok usia sekolah yang standar (contoh: kelompok usia SD=7-12 tahun, SMP=13-15 tahun, SMA=16-18 tahun).

Sumber data APM dapat dihitung dengan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) dari Keterangan Pendidikan. Karena APM adalah ukuran partisipasi sekolah, maka kita hanya akan melihat mereka yang sedang sekolah pada saat survei. Untuk itu, digunakan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Untuk pembilang, diambil dari Seksi "Keterangan Pendidikan" pertanyaan tentang partisipasi sekolah dan dipilih kategori 2 atau semua orang yang masih sekolah saat ini. Kemudian dikelompokkan berdasarkan pertanyaan tentang Jenjang dan Jenis Pendidikan Tertinggi yang pernah/sedang diduduki. Kemudian dikelompokkan lagi menurut kelompok umur yang diambil dari pertanyaan tentang Umur dari seksi "Keterangan Anggota Rumah Tangga".

2. Untuk penyebut, digunakan pertanyaan dari Seksi "Keterangan Anggota Rumah Tangga" untuk mengelompokkan penduduk berdasarkan kelompok usia yang berkaitan dengan tingkat pendidikan.

Nilai APM akan berkisar dari 0 sampai dengan 100. Tidak mungkin ditemukan APM lebih dari 100 karena jumlah siswa (pembilang) merupakan bagian dari jumlah penduduk usia tertentu (penyebut). Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang tertinggal atau terlalu cepat bersekolah. Kelemahan APM adalah kemungkinan adanya kekurangan estimasi karena siswa diluar kelompok usia yang standar di tingkat pendidikan tertentu. Contoh: Seorang anak usia 6 tahun bersekolah di SD kelas 1 tidak akan masuk dalam penghitungan APM karena usianya lebih rendah dibanding kelompok usia standar SD yaitu 7-12 tahun.

Rentang APM di Indonesia dari hasil tabulasi data Susenas 10 tahun terakhir untuk SD berkisar antara 50 sampai 95 persen, SMP antara 50 sampai 70 persen, dan SMA antara 20 sampai 50 persen.

Tingkat Pendidikan Tertinggi (TPT)

Definisi Tingkat Pendidikan Tertinggi atau disingkat TPT adalah persentase jumlah penduduk, baik yang masih sekolah ataupun tidak sekolah lagi, menurut pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan. Kegunaan TPT bermanfaat untuk menunjukkan pencapaian pembangunan pendidikan di suatu daerah. TPT juga berguna untuk melakukan perencanaan penawaran tenaga kerja, terutama untuk melihat kualifikasi pendidikan angkatan kerja di suatu wilayah.

Cara Menghitung TPT merupakan pembagian antara jumlah penduduk menurut pendidikan terakhir dengan jumlah penduduk keseluruhan.

$$\%TPT_h^t = \frac{P_h^t}{P^t} \times 100$$

P_h^t = jumlah penduduk yang mencapai jenjang pendidikan h pada tahun t

P^t = total jumlah penduduk pada tahun t

Data yang diperlukan dalam menentukan Tingkat Pendidikan Tertinggi adalah Jumlah

penduduk menurut ijazah terakhir yang ditamatkan dan Total jumlah penduduk.

Sumber Data TPT dapat dihitung menggunakan pertanyaan dari Seksi Keterangan Pendidikan tentang partisipasi sekolah dan dipilih kategori 2 yaitu penduduk yang masih sekolah dan kategori 3 yaitu penduduk yang tidak sekolah lagi. Untuk menghitung TPT menurut jenjang pendidikan, digunakan pertanyaan tentang berisi keterangan Ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat didefinisikan sebagai total nilai barang dan jasa yang diproduksi di wilayah (regional) tertentu dalam periode tertentu (satu tahun) yang besaran PDRB dapat dihitung melalui Pengukuran Arus Sirkular (*Circular Flow*).

Produk Domestik suatu wilayah merupakan nilai seluruh produk dan jasa yang diproduksi di wilayah tersebut tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari wilayah tersebut atau bukan. Pendapatan yang timbul oleh adanya kegiatan produksi tersebut merupakan pendapatan domestik. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menunjukkan gambaran "*Production Originated*" hal ini menyebabkan nilai produksi domestik yang timbul di suatu wilayah tidak sama dengan pendapatan yang diterima penduduk wilayah tersebut.

Perhitungan PDRB telah menjadi bagian yang sangat penting dalam makro ekonomi, khususnya tentang analisis perekonomian suatu wilayah. Hasil perhitungan PDRB ini memberikan kerangka dasar yang digunakan untuk mengukur aktifitas ekonomi yang terjadi dan berlangsung dalam suatu kegiatan perekonomian. Angka-angka PDRB sebagai indikator ekonomi makro juga sebagai landasan ekonomi evaluasi kinerja perekonomian dan penyusunan berbagai kebijakan. Indikator ekonomi ini juga memberikan gambaran aliran seluruh nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dan seluruh faktor-faktor produksi yang digunakan oleh perekonomian untuk menghasilkan nilai tambah barang dan jasa. (Bungaran Silalahi, 2011). Kegunaan PDRB antara lain :

1. Menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi menghasilkan oleh suatu daerah atau propinsi, nilai PDRB yang besar menunjukkan

kemampuan sumber daya ekonomi yang besar,

2. Menunjukkan pendapatan yang memungkinkan dapat dinikmati oleh seluruh penduduk suatu regional atau propinsi,
3. Digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dari tahun ketahun,
4. PDRB menurut sektor menunjukkan besarnya stuktur perekonomian dan peranan sektor perekonomian dalam suatu wilayah, sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peranan besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah,
5. PDRB menurut penggunaan menunjukkan bagaimana produk barang dan jasa digunakan untuk tujuan konsumsi, investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar,
6. Distribusi PDRB menurut penggunaan menunjukkan peranan kelembagaan menurut barang dan jasa yang dihasilkan sektor ekonomi,
7. PDRB menurut penggunaan atas dasar harga konstan bermanfaat untuk pengukuran laju pertumbuhan konsumsi, investasi dan perdagangan luar negeri maupun perdagangan antar pulau atau propinsi,
8. PDRB dan PDRB perkapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB dan PDRB perkapita atau persatu orang,
9. PDRB dan PDRB perkapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi perkapita.

Menurut Badan Pusat Statistik (2002) pengertian PDRB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan untuk seluruh wilayah usaha dan jasa dalam suatu wilayah, menerapkan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan seluruh unit ekonomi.

Menurut M.L. Jhingan (2003; 67) dalam penelitian Sumaryoto, bahwa: "salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (kenaikan PDB) adalah akumulasi modal yang lebih lazim disebut dengan investasi, baik yang dilakukan oleh masyarakat atau pemerintah. Apabila investasi tersebut dilakukan oleh pemerintah berupa dana yang bersumber dari kelebihan penerimaan di atas pengeluaran rutin, yang disebut dengan tabungan pemerintah (*government saving*)."

Menurut M.L. Jhingan (2004; 5) bahwa: "perkembangan ekonomi didefinisikan dalam tiga cara (1.) perkembangan ekonomi harus

diukur dalam arti kenaikan pendapatan nasional nyata dalam suatu jangka waktu yang panjang. (2) kenaikan pendapatan perkapita dalam jangka panjang dalam arti kenaikan pendapatan atau output nyata perkapita, (3) adanya kecenderungan lain untuk mendefinisikan perkembangan ekonomi dari titik tilik lain kesejahteraan ekonomi.”

Menurut Todaro (Sadono Sukirno, 2006; 213, dalam penelitian Fitri Amalia, 2010) “lajunya urbanisasi dalam suatu waktu tertentu ditentukan oleh dua faktor : perbedaan tingkat upah riil diantara daerah urban dengan daerah pertanian, dan kemungkinan memperoleh pekerjaan lain di daerah urban. Menurut Todaro faktor penting yang menyebabkan arus urbanisasi begitu tinggi adalah disebabkan karena adanya jurang besar antara upah riil di daerah pertanian dengan upah riil di daerah urban.”

Menurut Badan Pusat Statistik Nasional (2010), “Indeks Tendensi Konsumen bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai situasi bisnis dan perekonomian secara umum menurut pendapatan konsumen, yang didasarkan pada daya beli konsumen dan juga pada persepsi konsumen mengenai kondisi bisnis dan perekonomian.”

Menurut Lincoln Arsyad (2010; 22): Pendapatan nasional dibedakan ke dalam dua kelompok, yaitu pendapatan nasional nominal (menurut tingkat harga berlaku) dan pendapatan nasional riil (menurut tingkat harga konstan). beberapa metode untuk mendeflasikan pendapatan nasional, salah satunya menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK), yaitu indeks yang menunjukkan perubahan tingkat harga atas sekelompok barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat dari waktu ke waktu. Harga Berlaku adalah nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Harga Konstan adalah nilai tambah barang dan jasa yang dihitung.

Cara pengukuran Produk Domestik Regional Bruto, menurut Badan Pusat Statistik (2008) angka PDRB dapat diperoleh melalui tiga pendekatan yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran yang selanjutnya dijelaskan sebagai berikut :

1. Metode total keluaran (*the total-output method*) atau disebut dengan pendekatan produksi. Penghitungan PDRB ini adalah dengan cara jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi

yang berada di suatu wilayah/propinsi dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 9 sektor atau lapangan usaha yaitu; Pertanian, Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Listrik, Gas dan Air Bersih, Bangunan, Perdagangan, Hotel dan Restoran, Pengangkutan dan Komunikasi, Jasa Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, Jasa-jasa lainnya (Prima Sukmaraga, 2011).

2. Metode keluaran atas pengeluaran (*the spending-on-output method*) atau disebut dengan pendekatan pengeluaran. Penghitungan PDRB ini adalah dengan cara penjumlahan semua komponen permintaan akhir yaitu: Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung, Konsumsi pemerintah, Pembentukan modal tetap domestik bruto, Perubahan stok, Ekspor netto.
3. Metode pendapatan dari produksi (*the income-from-production method*). Penghitungan PDRB ini merupakan balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah dalam waktu tertentu. Balas jasa faktor produksi adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini PDRB mencakup juga penyusutan neto. Jumlah semua komponen pendapatan per sektor disebut sebagai nilai tambah bruto sektoral. Oleh karena itu PDRB merupakan jumlah dari nilai tambah bruto seluruh sektor (Prima Sukmaraga, 2011).
4. Metode alokasi, model pendekatan ini digunakan karena dengan data yang tersedia tidak memungkinkan untuk mengadakan perhitungan pendapatan regional dengan metode langsung.

Cara penyajian PDRB dapat dilakukan dengan,

1. PDRB atas harga berlaku, yakni semua agregat pendapatan dinilai atas dasar harga yang berlaku pada masing-masing tahunnya, baik pada saat menilai produksi dan biaya antara maupun pada penilaian komponen nilai PDRB.
2. PDRB atas harga konstan, yaitu semua agregat pendapatan dinilai atas dasar harga tetap, perkembangan agregat pendapatan dari

tahun ke tahun semata-mata karena perkembangan produksi rill, bukan karena kenaikan harga atau inflasi.

Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita

PDRB per kapita dapat dijadikan sebagai salah satu indikator guna melihat keberhasilan pembangunan perekonomian di suatu wilayah. PDRB adalah nilai bersih barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam periode (Hadi Sasana, 2006 dalam penelitian Prima Sukmaraga, 2011).

PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Oleh karena itu besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing daerah sangat bergantung kepada potensi sumber daya alam dan faktor produksi daerah tersebut. Adanya keterbatasan dalam penyediaanfaktor-faktortersebut menyebabkan besaran PDRB bervariasi antar daerah. Sedangkan PDRB per kapita dapat dihitung dari PDRB harga konstan dibagi dengan jumlah penduduk pada suatu wilayah (Prima Sukmaraga, 2011).

Dalam hubungan terhadap pertumbuhan ekonomi, PDRB merupakan ukuran hitungan yang digunakan pada perhitungan pertumbuhan ekonomi suatu daerah, dan PDB untuk ukuran negara. Secara umum pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai suatu proses kenaikan *output* perkapita dalam jangka panjang.

Sedangkan Prof. Simon Kuznets mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan idiologis yang diperlukannya.

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dihitung berdasarkan laju PDRB Atas Dasar Harga konstan, karena perkembangan berdasarkan laju harga konstan dianggap lebih rill tanpa melihat laju inflasi suatu daerah. Untuk menghitung pertumbuhan ekonomi suatu daerah berdasarkan perubahan PDRB harga konstan adalah :

$$Gt = \frac{\text{PDRB } t - \text{PDRB } t-1}{\text{PDRB } t-1} \times 100 \%$$

dimana :

Gt = Pertumbuhan ekonomi tahun (t)

PDRBt = PRDB tahun tertentu

$\text{PDRBt-1} = \text{PRDB tahun sebelumnya}$

Teknologi dan perekonomian tiap tahun mengalami perkembangan dan berakibat pada perubahan struktur ekonomi. Perkembangan ekonomi dunia yang diwarnai dengan adanya globalisasi berpengaruh terhadap perekonomian regional/domestik. Terjadinya krisis perekonomian suatu kawasan akan berdampak adanya perubahan struktur ekonomi sehingga penggunaan tahun dasar dibawah tahun 2000 tidak representatif lagi digunakan sebagai tahun dasar perhitungan PDRB.

Berdasarkan rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagaimana tertuang dalam buku Sistem Neraca Nasional yang dinyatakan bahwa estimasi PDB/PDRB atas dasar konstan harus dimuktakhirkan secara periodik dengan menggunakan tahun referensi yang berakhir 0-5. Hal ini dimaksudkan agar besaran angka-angka PDB/PDRB dapat saling diperbandingkan antar negara, provinsi, kabupaten dan antar waktu guna keperluan analisis kinerja perekonomian nasional atau wilayah (Bungaran Silalahi, 2011).

Tahun dasar yang dianggap representatif untuk mengukur laju perekonomian adalah tahun dasar 2000, hal ini dikarenakan tahun tersebut dianggap relatif lebih stabil setelah krisis ekonomi dan politik Indonesia tahun 1997. Cara penyamaan tahun dasar dapat dilakukan dengan membandingkan nominal atau angka PDRB yang tertera pada tahun dasar yang berbeda (1983, 1988, 1993) dengan PDRB tahun dasar 2000. (Bungaran Silalahi, 2011).

METODE

Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif melalui langkah perumusan hipotesis, pengelompokan data berdasarkan variabel dan mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh data yang diperlukan, menyajikan data dari tiap variabel, melakukan perhitungan untuk menjawab permasalahan yang diteliti dan pengujian hipotesis serta melakukan analisis dan pembahasan deskriptif atas dasar hasil penelitian empiris.

Data penelitian ini merupakan data sekunder *time series* 1991 sampai dengan 2014 yang meliputi data indikator pendidikan yang terdiri dari data Angka Partisipasi Sekolah dan Angka Tingkat Pendidikan Tertinggi dan Produk Domestik Regional Bruto DKI Jakarta.

Penelitian ini menggunakan data dari tahun 1991 – 2014.

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) variabel independen dan 1 (satu) variabel dependen yang diuraikan sebagai berikut :

1. Variabel Dependen penelitian ini adalah Produk Domestik Bruto Provinsi DKI Jakarta. Data Produk Domestik Bruto yang digunakan adalah berdasar pada harga konstan. Data tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta.
2. Variabel Independen penelitian ini terdiri dari dua variabel, pertama Angka Partisipasi Sekolah (APS) dengan menggunakan data Angka Partisipasi Sekolah Murni (APM). Kedua, Angka Tingkat Pendidikan Tertinggi (TPT). Variabel TPT yang digunakan adalah jumlah penduduk DKI Jakarta berdasarkan pendidikan yang ditamatkan yaitu Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan Perguruan Tinggi).

Analisis untuk mengetahui hubungan korelasional antar variabel digunakan analisis kuantitatif melalui pendekatan regresi linear berganda menggunakan software SPSS 22. Pengujian signifikansi hipotesis digunakan 2 (dua) alat uji. Uji hipotesis untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara parsial digunakan pendekatan uji t sedangkan untuk mengetahui pengaruh variabel dependen secara simultan digunakan uji F. Dari hasil analisis dan uji hipotesis dapat diketahui sejauh mana pengaruh-pengaruh variabel independen terhadap variabel dependent baik secara parsial (uji t)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persyaratan analisis regresi dilakukan melalui uji normalitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas dan autokorelasi. Hasil uji normalitas data, nilai *Asymp Sig (2-tailed)* sig 0,05, menunjukkan bahwa $X_1=0,857$ dan $X_2=0,695$ yang lebih besar dari α 5 % (0,05). Maka data dinyatakan berasal dari populasi berdistribusi normal.

Uji multikolinieritas melalui *Varian Inflation Factor*(VIF), bahwa VIF untuk kedua variabel independen bernilai 3,393 sedangkan *tolerance* 0,295 maka dalam hal ini $VIF < 5$ yaitu ($3,393 < 5$) sehingga model regresi tidak mempunyai kolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas menunjukkan bahwa baik variabel APS maupun TPT tidak terjadi heteroskedastisitas karena besarnya APS – $ax1$ $0,791 > 0,05$ dan TPT – $ax2$ $0,169 > 0,05$. Uji ini juga dikuatkan melalui pendekatan koefisien *Spearman Correlation* yang menunjukkan bahwa besarnya nilai $r_{hitung} < r_{tabel}$, yaitu APS – $ax1 = -0,063 < 0,450$ dan TPT – $ax2 = -0,341 < 0,450$, maka tidak terdapat adanya heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi menunjukkan bahwa semua variabel yang dihipotesiskan dalam penelitian ini tidak terdapat autokorelasi, dengan *unirun test* 0,144 dan lebih besar dari 0,05. Analisis regresi berganda dalam penelitian ini menghasilkan persamaan :

$$Y = 67367213,85 - 323,649APS + 230,162TPT.$$

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Partial	Tolerance	VIF
(Constant)	67367213.85	195752046.40		.344	.734					
1 APS	-323.649	146.296	-.258	2.212	.038	.719	-.435	.140	.295	3.393
TPT	230.162	23.040	1.163	9.990	.000	.947	.909	.631	.295	3.393

a. Dependent Variable: PDRB maupun simultan.

Angka Partisipasi Sekolah secara parsial berpengaruh terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto, dengan besar koefisien 323,649, terbukti pada uji t-hitung -2,212. Sementara, Tingkat Pendidikan Tertinggi terbukti berpengaruh terhadap PDRB dengan koefisien 230,162 pada uji t hitung 9.990. Interpretasi

persamaan regresi berganda tersebut, bahwa tanpa adanya APS dan TPT di DKI Jakarta maka nilai PDRB DKI Jakarta sebesar Rp. 67.367.213,85,-. APS berpengaruh negatif terhadap PDRB DKI Jakarta, dimana jika APS bertambah per siswa maka PDRB DKI Jakarta mengalami penurunan sebesar Rp. 323,65,- dan

begitupula sebaliknya. Pengaruh TPT terhadap PDRB DKI Jakarta adalah positif dimana, jika TPT bertambah per satu siswa maka PDRB DKI Jakarta akan naik sebesar Rp.230,16,- begitupula sebaliknya jika TPT turun per satuan/siswa maka PDRB DKI Jakarta akan turun sebesar Rp. 230,16,-. Pengaruh simultan variabel APS dan TPT terhadap PDRB ditunjukkan pada hasil

perhitungan *R square* sebesar 0,908 dengan dukungan *F* hitung sebesar 114,62 artinya bahwa secara simultan variabel APS dan TPT berpengaruh terhadap PDRB sebesar 90,8% sedangkan sebesar 9,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dihipotesiskan dalam penelitian ini.

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	561795451032612420.000	2	280897725516306208.000	114.624	.000 ^b
Residual	51462829177039568.000	21	2450610913192360.500		
Total	613258280209651970.000	23			

a. Dependent Variable: PDRB

b. Predictors: (Constant), TPT, APS

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.957 ^a	.916	.908	49503645.4536	.785

a. Predictors: (Constant), TPT, APS

b. Dependent Variable: PDR

Dari hasil penelitian di atas, cukup menarik untuk dilakukan pembahasan lebih mendalam tentang Angka Partisipasi Sekolah, Pendapatan Domestik Regional Bruto beserta keterkaitan antar dua variabel tersebut sehingga didapatkan rujukan solusi dalam meningkatkan atau mengatasi permasalahan APS dan PDRB di DKI Jakarta.

Strategi Peningkatan APS

APS menjadi salah satu indikator utama untuk melihat sejauh mana tingkat kualitas hidup masyarakat khususnya pada sudut melek huruf. Peningkatan APS membutuhkan evaluasi atas strategi yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya. Tabel 1 berikut menggambarkan Angka Partisipasi Sekolah DKI Jakarta pada periode 2010 – 2014.

Tabel 3
Angka Partisipasi Sekolah DKI Jakarta periode 2010 – 2014

Tahun	Penduduk 7-24 tahun yg Masih Sekolah				TOTAL APS (Jiwa)
	7 - 12	13 - 15	16 - 18	19- 24	
2010	918,905	343,400	318,988	210,868	1,792,161
2011	837,875	343,594	423,243	303,325	1,908,037
2012	785,086	349,134	374,346	333,626	1,842,192
2013	864,570	384,042	283,968	352,683	1,885,263
2014	864,494	385,272	446,243	378,237	2,074,246

Dari data di atas dapat dilihat bahwa Angka Partisipasi Sekolah DKI Jakarta mengalami naik turun, tahun 2011 APS total naik sebesar 7,77, tahun 2012 turun 9,60%, tahun 2013 naik 9,35% dan tahun 2014 naik sebesar

17,20%. Beberapa indikator yang dimungkinkan sebagai penentu respon APS adalah tingkat ekonomi masyarakat, tingkat kesejahteraan masyarakat, fasilitas pendidikan dan tenaga pengajar/guru, anggaran bidang pendidikan.

Strategi rujukan untuk mengatasi beberapa faktor penentu APS di DKI Jakarta dalam penelitian ini terbagi dalam 3 konsep sasaran strategi yaitu menjamin kepastian masyarakat dalam memperoleh pendidikan dasar, pendidikan menengah yang terjangkau dan meningkatkan daya saing pada pendidikan tinggi. Melalui tiga sasaran dasar ini diharapkan faktor-faktor penentu APS dapat diatasi.

Strategi untuk menjamin masyarakat memperoleh layanan pendidikan dasar bermutu dan terjangkau melalui beberapa strategi yaitu penyediaan tenaga pendidik pendidikan dasar berkompeten, manajemen satuan pendidikan dasar berkompeten, pengembangan sistem pembelajaran, standar mutu pendidikan dasar, penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk penerapan sistem pembelajaran SD/SDLB/Paket A dan SMP/SMPLB/Paket B, mengevaluasi kebijakan Kartu Jakarta Pintar (KJP) agar sasaran penyediaan subsidi dan atau pembiayaan tepat sasaran bagi masyarakat kurang mampu. Selain beberapa strategi tersebut DKI Jakarta dapat melakukan penyediaan pendidikan khusus untuk menjalankan model pembelajaran mandiri baik formal maupun informal berbasis komunitas.

Strategi untuk sasaran pendidikan menengah bermutu dan terjangkau yaitu melalui pelaksanaan strategi penyediaan tenaga pendidik pendidikan menengah berkompeten, manajemen satuan pendidikan menengah berkompeten, penyediaan dan pengembangan sistem pembelajaran, informasi berbasis riset, meningkatkan standar mutu pendidikan menengah melalui akreditasi, penyediaan dan peningkatan sarana prasarana untuk penerapan sistem pembelajaran SMA/Paket C, SMK kejuruan berbasis keunggulan lokal, penyediaan subsidi untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan SMA/SMLB/SMK/Paket C, penyediaan subsidi pembiayaan untuk penerapan sistem pembelajarankhusus bagi masyarakat kurang mampu.

Daya saing pendidikan tinggi di DKI Jakarta dapat diciptakan melalui langkah strategiyaitumenciptakan dosen berkompeten untuk mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang bermutu dan berdaya saing, peningkatan mutu pengelolaan perguruan tinggi untuk mendukung pelaksanaan tridharma yang berdaya saing dan akuntabel, penyediaan informasi berbasis riset dan standar mutu pendidikan tinggi dan keterlaksanaan akreditasi

serta pengembangan dan pembinaan bahasa untuk pendidikan tinggi, penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk penerapan sistem pembelajaran perguruan tinggi bermutu dan berdaya saing, peningkatan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu, relevan dengan kebutuhan bangsa dan negara, penyediaan subsidi untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan perguruan tinggi bermutu.

Ketiga konsep strategi yang diuraikan di atas secara sinergis harus dilaksanakan oleh seluruh kabupaten/kota atau wilayah di DKI Jakarta. Koordinasi antar dinas pendidikan nasional dan atau pendidikan tinggi di wilayah kabupaten/ kota DKI Jakarta menjadi salah satu faktor keberhasilan untuk meningkatkan APS secara bersama-sama. Implementasi fungsi manajemen pendidikan harus secara efektif dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga setiap hambatan yang terjadi dapat dengan segera dievaluasi dan melakukan kebijakan berdasarkan data atau fakta di lapangan.

Kinerja pendidikan DKI Jakarta bahkan dalam semua bidang pembangunan merupakan barometer bagi daerah-daerah lain di Indonesia, sehingga keberhasilan maupun kegagalan DKI Jakarta seakan-akan menjadi isu nasional bagi masyarakat di seluruh Indonesia. Perhatian terhadap tingkat APS DKI Jakarta menjadi serius disamping berpengaruh terhadap PDRB juga sebagai tindakan preventif timbulnya masyarakat buta huruf di era globalisasi, dimana sumber daya manusia dituntut harus berpengetahuan, terampil dan bersaing dengan sumber daya manusia asing di Indonesia.

Strategi Peningkatan Tingkat Pendidikan Tertinggi

Sumber Daya Manusia yang mempunyai tingkat pengetahuan dengan skill menjadi modal utama dalam pembangunan, begitupula dengan DKI Jakarta. Indikator SDM berpengetahuan salah satunya ditunjukkan pada bukti eksplisit yaitu ijazah pendidikan tertinggi. Jika pemerintah pada beberapa tahun terakhir ini menargetkan masyarakat menempuh 12 tahun pendidikan, maka di waktu selanjutnya bahkan sekarang ini seyogyanya telah menargetkan masyarakat berpendidikan dasar sampai dengan tingkat Perguruan Tinggi. Sudut pandang keterampilan atau skill pendukung menjadi satu syarat lain yang secara berkelanjutan harus diberikan

pemahaman bahwa era globalisasi tidak hanya lulusan Diploma 3 atau S1 dengan indeks prestasi tinggi yang dibutuhkan tetapi harus disempurnakan dengan keahlian khusus yang harus dimiliki oleh setiap SDM agar mampu bersaing dengan SDM asing.

Tingkat pendidikan tertinggi masyarakat di DKI Jakarta pada periode 2010 sampai dengan 2014 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 4
Angka Pendidikan Tertinggi DKI Jakarta

Tahun	SLTA /Sederat	Perguruan Tinggi	Jumlah
2010	2,793,044	1,134,169	3,927,213
2011	2,938,877	1,029,117	3,967,994
2012	2,987,100	1,036,922	4,024,022
2013	3,021,622	1,350,921	4,372,543
2014	3,076,424	1,378,435	4,454,859

Sumber : Data BPS diolah, 2016

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2010, tingkat pendidikan tertinggi SLTA sederajat sebesar 71,12% sedangkan 28,88% adalah berpendidikan tinggi, 2011 besarnya penduduk berpendidikan SLTA sederajat sebesar 74,06% dan 25,94% adalah berpendidikan tinggi, 2012 menunjukkan bahwa 74,23% berpendidikan SLTA sederajat dan 25,77% adalah berpendidikan tinggi, 2013 penduduk berpendidikan SLTA sederajat 69,10% dan 30,90% adalah berpendidikan tinggi. Pada tahun 2014 prosentase antara pendidikan SLTA dan perguruan tinggi nyaris tidak berubah yaitu 69,06 % SLTA sederajat dan 30,94% berpendidikan tinggi.

Komposisi tingkat pendidikan DKI Jakarta sebagai kota besar dan Ibukota dapat dibilang memprihatinkan. DKI sebagai pusat kegiatan ekonomi terbesar di Indonesia secara agregat hanya mempunyai SDM yang berpendidikan tinggi (PT) tidak lebih dari 30%. Sehingga hal ini menuntut pemerintah setempat bahkan pemerintah pusat, segera melakukan re-evaluasi dan strategi agar SDM DKI Jakarta secara mayoritas berpendidikan tinggi.

Upaya mendorong masyarakat untuk menyelesaikan setiap jenjang pendidikan dengan kembali melihat permasalahan atau faktor-faktor penentu yang mempengaruhi tidak terselesainya studi, yaitu kemampuan ekonomi masyarakat,

daya tarik masuk dunia kerja yang lebih besar dari pada melanjutkan pendidikan, persepsi masyarakat kualitas pendidikan Indonesia dan akses lembaga pendidikan.

Motivasi menjadi landasan dasar yang harus ditingkatkan oleh masyarakat untuk meraih pendidikan tinggi. Sehingga sebelum lebih lanjut kepada strategi formal yang harus dijalankan oleh pemerintah DKI Jakarta, pemerintah harus mampu memberikan motivasi kepada seluruh masyarakat baik secara langsung oleh DIKTI maupun DIKNAS atau secara tidak langsung yaitu melalui Guru dan Dosen. Pemberian motivasi juga diarahkan kepada tingkat paling bawah yaitu Orang Tua/Wali untuk terus secara bersama-sama memberikan pandangan peran pendidikan bagi kualitas hidup bagi anak-anaknya.

Kemampuan ekonomi masyarakat menjadi alasan mendasar sebagian besar masyarakat untuk tidak sekolah atau meneruskan pendidikan pada jenjang lanjutan. Strategi umum yang dilakukan adalah memberikan bantuan atau subsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah. Strategi ini cukup efektif jika subsidi yang diberikan kepada masyarakat tepat sasaran, sehingga dibutuhkan kontrol alokasi subsidi ke masyarakat baik sasaran maupun alokasi. Strategi yang lain dapat dilakukan yaitu memperkuat kelembagaan lembaga pendidikan untuk melaksanakan pembelajaran biaya murah baik Negeri maupun Swasta. Program pemerintah melalui Kartu Indonesia Pintar secara Nasional maupun Kartu Jakarta Pintar yang dilakukan pemerintah DKI Jakarta merupakan langkah untuk menjawab permasalahan ekonomi masyarakat dalam mendapatkan layanan pendidikan. Seberapa besar tingkat keefektifan dari program tersebut dapat dijawab tepat jika implementasi dan kontrol pada program tersebut sudah dilakukan dengan baik, tepat dan berkesinambungan.

Keterbatasan ekonomi dapat memunculkan pilihan alternatif yaitu memilih bekerja daripada melanjutkan pendidikan. Daya tarik dunia kerja di DKI Jakarta cukup besar, karena DKI Jakarta merupakan salah satu basis Industri terbesar di Indonesia sehingga banyaknya perusahaan-perusahaan baik BUMN maupun Swasta memberikan opsi lain yang harus ditempuh bagi masyarakat dari pada pendidikan. Keadaan ini menuntut lembaga pendidikan khususnya pendidikan tinggi harus mampu melihat peluang dan menyesuaikan diri terhadap perilaku

masyarakat. Implementasi dari keadaan ini adalah pendidikan tinggi sebagai jenjang tertinggi dalam pendidikan dituntut menyediakan layanan pendidikan intensif/ekstra khusus bagi karyawan. Menempatkan biaya terjangkau pada model pembelajaran merupakan langkah strategis bagi masyarakat kelas menengah ke bawah agar masyarakat selain dapat bekerja juga mempunyai kesempatan untuk melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi. Pemerintah DKI Jakarta juga dituntut untuk mampu memberikan dorongan serta kelonggaran hukum/peraturan kepada lembaga pendidikan untuk melaksanakan program pendidikan ekstra bagi karyawan.

Langkah untuk mengatasi persepsi tentang kualitas pendidikan yang relatif masih rendah dibanding negara atau wilayah lain hanya dengan satu cara yaitu meningkatkan kualitas terukur. Peningkatan kualitas lembaga pendidikan adalah dengan melaksanakan sistem pengelolaan profesional. Pemerintah harus mampu mendorong otonomi dan akuntabilitas bagi setiap lembaga pendidikan dengan konsep *Good Corporate Governance*, otonomi pengambilan keputusan berkaitan dengan kurikulum, penyediaan staff dan tenaga pengajar serta penganggaran operasional. Untuk mendukung akuntabilitas dan transparansi pengelolaan pendidikan, setiap lembaga pendidikan harus memberikan ruang informasi yang jelas kepada siswa atau mahasiswa untuk memilih dan pindah ke sekolah/perguruan lain.

Melalui kekuatan peraturan, Pemerintah harus mampu mendorong tersedianya sarana dan prasarana yang tepat sasaran untuk menyiapkan dan menciptakan lulusan siswa / mahasiswa berdaya saing kepada setiap lembaga pendidikan. Tenaga pengajar menjadi tumpuan dasar untuk menciptakan masyarakat yang cerdas dan berkarakter, sehingga dibutuhkan tenaga pengajar yang mempunyai kompetensi serta kualitas yang baik.

Meningkatkan angka tingkat pendidikan tertinggi masyarakat, pemerintah DKI Jakarta harus mampu menjamin akses pendidikan yang mudah dijangkau, melalui penyelesaian permasalahan kemacetan transportasi, peraturan yang memberikan kemudahan bagi investor/pengelola pendidikan untuk mendirikan atau menambah pembangunan gedung sekolah baru, birokrasi pendaftaran/ perpindahan peserta didik, menciptakan akses dan kerjasama dengan perusahaan lokal, maupun internasional untuk

menjamin lulusan siswa/mahasiswa bekerja dan peluang berwiraswasta.

Investasi Peningkatan APS dan Pendidikan Tertinggi untuk Meningkatkan PDRB DKI Jakarta

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Sekola (APS) berpengaruh negatif terhadap PDRB sedangkan Tingkat Pendidikan Tertinggi (TPT) berpengaruh positif terhadap PDRB. Pandangan lebih jauh dari hasil ini adalah bahwa baik APS maupun TPT merupakan investasi awal bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di DKI Jakarta. Walaupun meningkatnya APS tidak disertai peningkatan PDRB tetapi pada akhirnya ketika APS menunjukkan kenaikan diharapkan angka TPT di DKI Jakarta akan terus mengalami kenaikan, sehingga kenaikan angka TPT ini memberikan dampak positif bagi pertumbuhan PDRB DKI Jakarta.

Semakin tinggi TPT ini diharapkan masyarakat memiliki *skill* dan kemampuan yang lebih baik untuk menjadi tenaga kerja yang lebih produktif di segala bidang industri ekonomi. Pembangunan fasilitas-fasilitas pendidikan yang bertujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan tidak kalah pentingnya. Membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi memang sangat penting, untuk dapat meningkatkan taraf hidup bagi masyarakat DKI Jakarta dan akan berdampak pada peningkatan PDRB per kapita Provinsi DKI Jakarta.

Diperlukan kesadaran masyarakat di DKI Jakarta juga semakin sadar akan pentingnya pendidikan, apalagi bagi masyarakat di DKI Jakarta yang merupakan Ibukota negara Indonesia. Walaupun nilai Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*) dan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto di DKI Jakarta paling tinggi di bandingkan dengan 32 provinsi lain di Indonesia, hal ini tidak menjamin bahwa seluruh masyarakat akan memiliki porsi yang sama dalam mendapatkan kesempatan mengenyam pendidikan yang baik jika melihat keadaan di DKI Jakarta masih banyak penduduk yang berada pada garis kemiskinan dan banyak anak-anak yang masih mengalami putus sekolah. Untuk itu diperlukan pengalokasian dana anggaran pendidikan yang merata untuk semua kalangan masyarakat dari pemerintah daerah DKI Jakarta.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dan hasil analisis data, maka dapat disimpulkan bahwa sebagai :

1. Provinsi DKI Jakarta sebagai pusat perputaran arus perekonomian terbesar di Indonesia harus didukung oleh kualitas manusia sebagai *Human Capital* (modal insani) yang dapat diupayakan melalui peningkatan Angka Partisipasi Sekolah dan Tingkat Pendidikan Tinggi.
2. Berdasarkan hasil analisis korelasi individual diperoleh korelasi APS terhadap PDRB sebesar 0,719 dan TPT terhadap PDRB sebesar 0,947 sedangkan korelasi antar variabel bebas sebesar 0,775. Korelasi *multiple* dua variabel bebas (APS dan TPT) sebesar 0,840 menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara variabel independen (X_1 (APS) dan X_2 (TPT) dengan variabel dependen ($Y =$ PDRB) berarti hubungan antara APS & TPT dengan PDRB sebesar 95,70%. Sedangkan Koefisien Determinasi sebesar 0,916 atau sebesar 91,60 % PDRB ditentukan atau dipengaruhi oleh Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Tingkat Pendidikan Tertinggi (TPT) penduduk DKI Jakarta sedangkan sisanya sebesar 8,4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dapat diterangkan dalam penelitian ini.
3. Melalui analisis regresi berganda diperoleh persamaan $Y = 67367213,85 - 323,649APS + 230,162TPT$, artinya bahwa Angka Partisipasi Sekolah secara parsial berpengaruh terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto, dengan besar koefisien yaitu 323,649 yang terbukti pada uji t-hitung sebesar -2,212. Variabel X_2 yaitu Tingkat Pendidikan Tertinggi terbukti berpengaruh terhadap PDRB dengan koefisien sebesar 230,162 pada uji t hitung sebesar 9.990. Interpretasi dari hasil persamaan regresi berganda tersebut adalah bahwa tanpa adanya APS dan TPT di DKI Jakarta maka nilai PDRB DKI Jakarta sebesar Rp. 67.367.213,85,-. Sedangkan APS mempunyai pengaruh negatif terhadap PDRB DKI Jakarta, dimana jika APS bertambah per siswa maka PDRB DKI Jakarta mengalami penurunan sebesar Rp. 323,65,- dan begitupula sebaliknya. Pengaruh TPT terhadap PDRB DKI Jakarta adalah positif dimana, jika TPT

bertambah per satu siswa maka PDRB DKI Jakarta akan naik sebesar Rp.230,16,- begitu pula sebaliknya jika TPT turun per satuan/siswa maka PDRB DKI Jakarta akan turun sebesar Rp. 230,16,-.

4. Pengaruh simultan variabel APS dan TPT terhadap PDRB ditunjukkan pada hasil perhitungan R^2 sebesar 0,908 dengan dukungan F hitung sebesar 114,62 artinya bahwa secara simultan variabel APS dan TPT berpengaruh terhadap PDRB sebesar 90,8% sedangkan sebesar 9,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dihipotesiskan.

Saran

Berdasarkan analisis data dan hasil penelitian yang diperoleh, maka saran penulis adalah sebagai berikut:

1. Perhatian terhadap peningkatan PDRB DKI Jakarta selain meningkatkan pembangunan di bidang industrialisasi komersil juga harus memperhatikan pembangunan kualitas manusia terutama di bidang melalui peningkatan Angka Partisipasi Sekolah dan Tingkat Pendidikan Tertinggi.
2. Strategi rujukan untuk mengatasi beberapa faktor penentu Angka Partisipasi Sekolah dan Tingkat Pendidikan Tertinggi di DKI Jakarta dalam penelitian ini terbagi dalam 3 konsep sasaran strategi yaitu menjamin kepastian masyarakat dalam memperoleh pendidikan dasar, pendidikan menengah yang terjangkau dan meningkatkan daya saing pada pendidikan tinggi, penyediaan tenaga pendidik bagi pendidikan dasar, menengah dan perguruan tinggi yang berkompeten, manajemen satuan pendidikan berkompeten, pengembangan sistem pembelajaran, standar mutu pendidikan, penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk penerapan sistem pembelajaran dan mengevaluasi kebijakan Kartu Jakarta Pintar (KJP) agar sasaran, menempatkan biaya terjangkau pada model pembelajaran merupakan langkah strategis bagi masyarakat kelas menengah ke bawah agar masyarakat selain dapat bekerja juga mempunyai kesempatan untuk melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi.

DAFTAR RUJUKAN

- Anwar, Arsyad Muhammad, dkk. 1995. *Prospek Ekonomi Indonesia Sumber Daya, Teknologi, dan Pembangunan*. Jakarta: FEUI dan PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Arsyad, Lincolin. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah. 2000. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2010. *Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia*. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. 1991 – 2014. *Pendapatan Regional DKI Jakarta*. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2012. *Indonesia Educational Statistics In Brief*. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2010. *Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi DKI Jakarta*. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2010. *Kinerja Pembangunan DKI Jakarta*. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2011. *Statistik Daerah Provinsi DKI Jakarta 2011*. Jakarta.
- Djohanputro, Bramantyo. 2006. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Makro*. Jakarta: Penerbit PPM.
- J. Supranto. 2005. *Ekonometri Buku Kesatu dan Buku Kedua*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Jhingan, M. L. 2008. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Kuncoro, Mudrajad. 2010. *Dasar-Dasar Ekonomika Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mankiw, N. Gregory. 2003. *Teori Makro Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Nachrowi, D. Nachrowi dan Hardius Usman. 2006. *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika Untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Pratisto, Arif. 2004. *Cara Mudah Mengatasi masalah Statistik dan Rancangan Percobaan dengan SPSS 12*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Simanjuntak, J. Payaman. 1985. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sudarmanto, R. Gunawan. 2005. *Analisis Regresi Linear Ganda dengan SPSS*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, Sadono. 2004. *Makroekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sukirno, Sadono. 1985. *Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*. Jakarta: FEUI & Bima Grafika.
- Tirtaraharja, Umar dan S. L. La Sulo. 2008. *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Todaro, T. Michael. 2006. *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003. 2008. *Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Citra Umbara.
- Wahana Komputer. 2010. *Mengolah Data Hasil Penelitian dengan SPSS 17*. Semarang: Penerbit Andi.

